



Laporan Kinerja
KPPN SIJUNJUNG

2022

KATA PENGANTAR



Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung sebagai salah satu unit vertikal di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja (Laporan Kinerja/LAKIN) yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil dan capaian atas pelaksanaan program/kegiatan jajaran KPPN Sijunjung. Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN.

LAKIN KPPN Sijunjung Tahun 2022 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Sijunjung untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Sijunjung, 25 Januari 2023
Kepala KPPN Sijunjung,



Hafnizar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Kementerian Keuangan memiliki tugas strategis, yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJPb telah menetapkan visi, yaitu "*Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan dan Akuntabel*". Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai instansi vertikal di lingkup Ditjen Perbendaharaan mengikuti visi tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Sijunjung menjalankan misi yang meliputi: Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN mengemban misi sebagai berikut : (1) Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah; (2) Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel; (3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, KPPN Sijunjung menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2022, ditetapkan 9 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, secara keseluruhan kinerja KPPN Sijunjung sudah baik dari 20 IKU DJPb tahun 2022, seluruhnya telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi) dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/Lteralisasi sebesar 92,60 dengan target 89;
2. Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPNteralisasi sebesar 99,40 dengan target 95;
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN, teralisasi sebesar 4,83 dengan target 4,65;

4. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu, terealisasi sebesar 99,97 dengan target 99,40;
5. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dengan target 100%;
6. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan terealisasi 95,63% dengan target 90%;
7. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan terealisasi sebesar 95,46% dengan target 88,5% ;
8. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN terealisasi sebesar 100% dengan target 83%;
9. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terealisasi sebesar 4 dengan target 3,15;
10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar 99,27 dengan target 90;
11. Indeks implementasi Digipay terealisasi sebesar 4 dengan target 3;
12. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker terealisasi 100% dengan target 90%;
13. Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA terealisasi sebesar 4 dengan target 3,25
14. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu, terealisasi sebesar 100% dengan target 98,5%;
15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization, terealisasi sebesar 88,65 dengan target 84,5;
16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 96,60 dengan target 85;
17. Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 87,7 dengan target 78;
18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, terealisasi sebesar 96,09% dengan target 95,5%;
19. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB, terealisasi sebesar 96,20 dengan target 83;
20. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan, terealisasi sebesar 161,91% dengan target 100%;

Kinerja lainnya KPPN Sijunjung pada tahun 2022 yaitu capaian Inisiatif Strategis yang nilainya telah melebihi nilai target. Inisiatif Strategis KPPN Sijunjung

Pada tahun 2022 yaitu:

1. Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja,
2. Tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan,
3. Penyusunan Laporan RPA Tingkat KPPN

Seluruhnya telah dilaksanakan dan dapat memenuhi output sesuai harapan.

Pada sisi pengelolaan anggaran, KPPN Sijunjung telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2022 untuk semua jenis belanja sebesar 99,31%, yaitu Rp1.251.379.955,- dari total pagu sebesar Rp1.260.124.000,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
C. Peran Strategis	10
D. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	12
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	45
C. Kinerja Lainnya	48
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	
Matriks Cascading	

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1	Dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu- <i>Three</i> Tahun 2022	18
2	Rekapitulasi masukan kontrak kinerja tahun 2022	20
3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	21
4	Capaian NKO	23
5	<i>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L</i>	24
6	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	26
7	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	27
8	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	28
9	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	30
10	Implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	31
11	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	32
12	Persentase akurasi perencanaan kas	33
13	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	34
14	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	35
15	Indeks Implementasi Digipay	35
16	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	36
17	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	38
18	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	39
19	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	40
20	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	41
21	Nilai rata-rata hard competency pegawai	42
22	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	43
23	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	44
24	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	45
25	Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja KPPN Sijunjung	45
26	Pagu dan Realisasi Anggaran KPPN Sijunjung TA 2022 Per Kegiatan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai peran strategis sebagai perpanjangan tangan Bendahara Umum Negara (BUN). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan / dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPPN Sijunjung dituntut menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Sijunjung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi KPPN Sijunjung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dharmasraya.

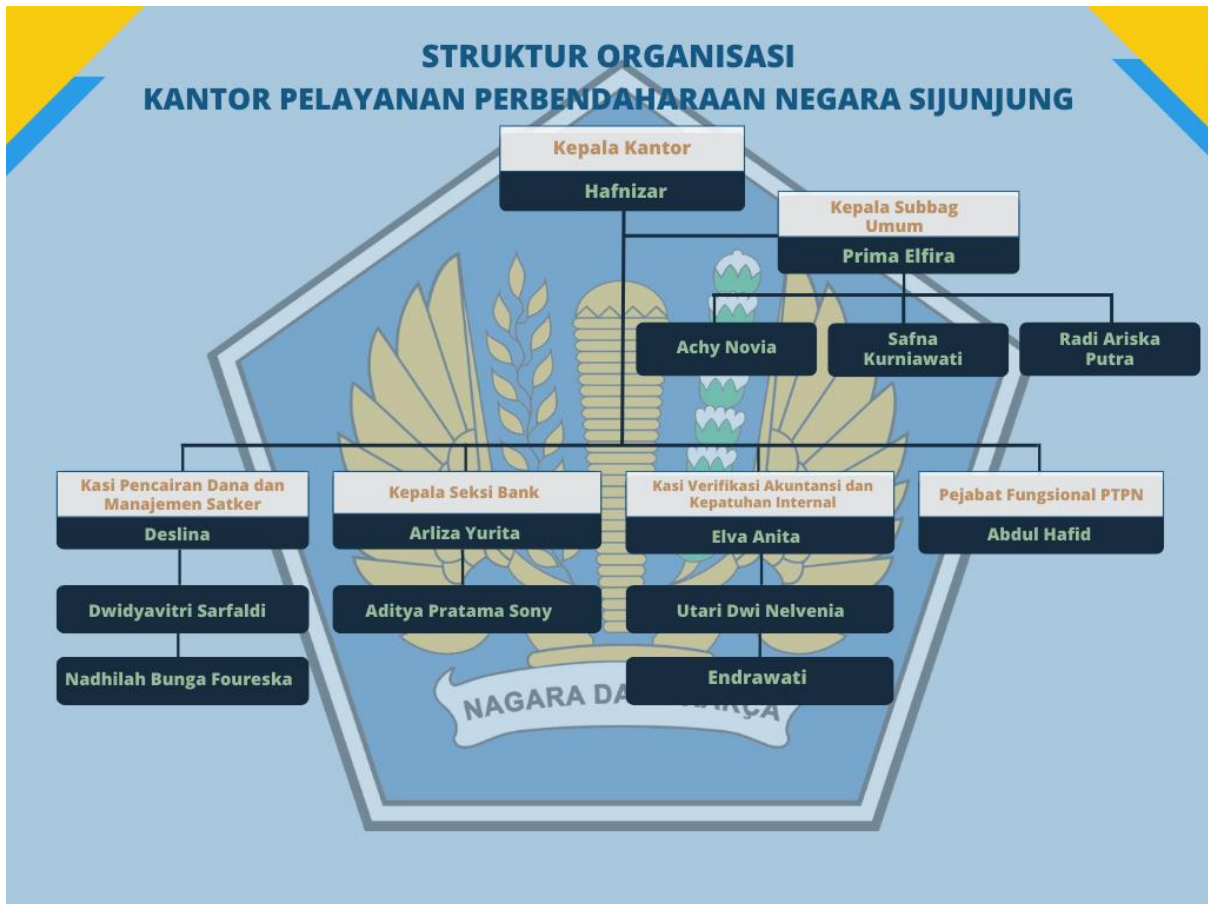
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Sijunjung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas dimaksud KPPN menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
- c. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
- f. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan APBN;
- h. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN);
- i. Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- j. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
- k. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
- l. Pelaksanaan kehumasan;
- m. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Secara organisatoris, KPPN Sijunjung adalah instansi pelayanan publik tipe A2 setingkat eselon 3. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan terdiri dari Subbbagian Umum, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Bank serta Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, serta Fungsional PTPN sebagaimana terlihat dalam bagan struktur organisasi berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI KPPN SIJUNJUNG TAHUN 2022



Dalam pelaksanaan tugas, KPPN Sijunjung selalu mengacu kepada SOP (*Standard Operating Procedure*), yakni Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-151/PB/2013 tentang Standar Operasi Prosedur Pelaksanaan Piloting SPAN dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN. Metodologi yang digunakan menggunakan matriks RASCI (*Responsible, Approval, Support, Consult, Informed*) yang mendefinisikan tugas tanggung jawab yang digunakan dalam manajemen, terutama untuk mengidentifikasi peran dan tanggungjawab dalam pekerjaan yang ada. Mengingat peran strategis dan tantangan besar yang diemban, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen KPPN Sijunjung harus

senantiasa berorientasi dan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku.

Keberhasilan mengemban amanat ini, disadari akan sangat dipengaruhi oleh tiga komponen dominan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, yang ditopang oleh *Standard Operating Procedure* (SOP) yang senantiasa mengantisipasi perkembangan yang terjadi, serta tersedianya dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas.

Disamping tiga komponen tersebut, keberhasilan mengemban peran strategis juga dipengaruhi oleh unsur di luar lingkup organisasi dalam hal ini budaya kerja bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat diharapkan oleh masyarakat luas, serta komunikasi maupun koordinasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik.

C. PERAN STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal dan kepanjangan tangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Sijunjung memiliki peran strategis, setidaknya karena dua alasan sebagai berikut :

1. Merupakan satu-satunya wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi menerima, menyalurkan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah kerjanya;
2. Merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga baik tidaknya pelayanan yang diberikan akan berdampak pada citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dengan peran strategis yang telah disebutkan, KPPN Sijunjung senantiasa untk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder kami. Dengan globalisasi yang terus berkembang, kami dituntut untuk terus beradaptasi dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat dan beragam. Salah satunya kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Penerapan proses kerja yang berbasis teknologi informasi terus kami upayakan

dengan meminimalisasi pelaksanaan proses kerja secara manual dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPPN Sijunjung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Kinerja Lainnya

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- 2) Rencana Kinerja Tahun 2022;
- 3) Achievement Unit;
- 4) Lain-lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai perencanaan yang mengutamakan hasil (*result*) dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan-harapan konsumen, *stakeholder* dan pemegang kebijakan yang terkait erat dengan fungsi utama organisasi yang dituangkan secara jelas dalam pernyataan visi organisasi. Diharapkan dengan penetapan perencanaan strategis dapat memberikan arah pada segenap komponen organisasi ke arah mana organisasi ini akan dibawa.

Visi

Sebagai organisasi yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, KPPN Sijunjung melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban APBN serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi DJPb yang telah ditetapkan adalah "*Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan dan Akuntabel*". Dengan visi ini diharapkan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Misi

Pada Misi Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, KPPN berperan dalam mendukung misi nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif). Dukungan tersebut diwujudkan melalui visi yang diemban KPPN Sijunjung sebagai berikut :

- (1) Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
- (2) Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
- (3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

RENCANA KERJA (RENJA) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan berpedoman pada Sasaran Strategis KPPN, disusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan Renja yang telah ditetapkan, KPPN Sijunjung menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan, sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA meliputi output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

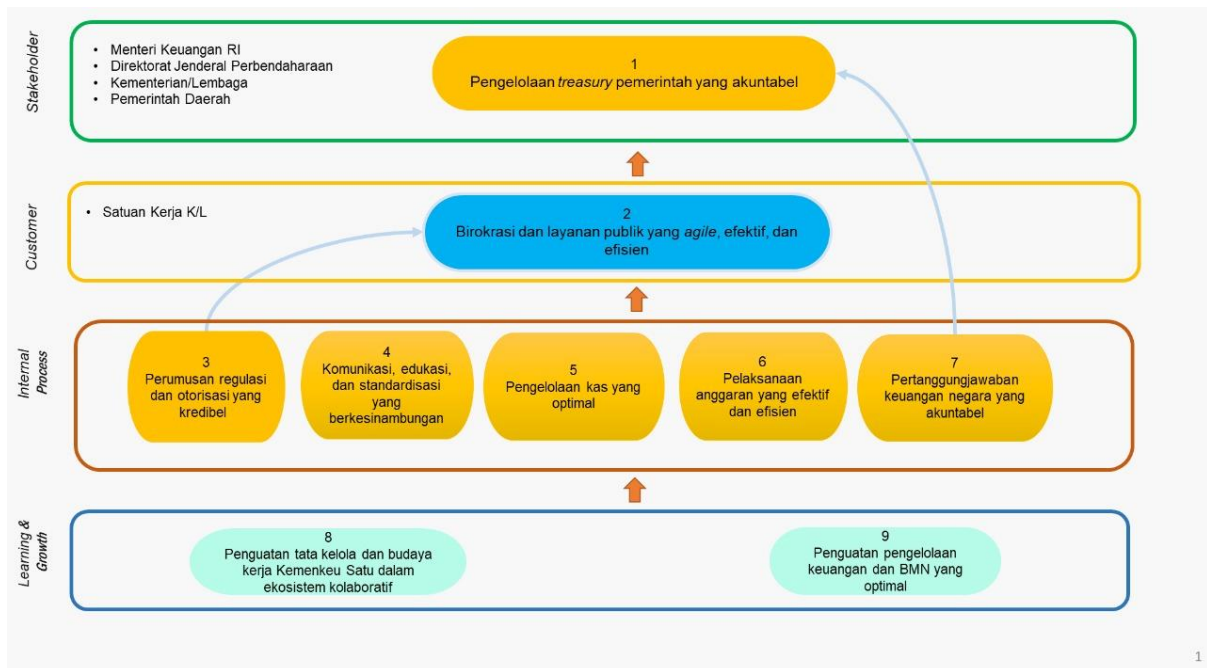
Upaya pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang dijabarkan dalam indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Kepala KPPN Sijunjung Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan dokumen Renja, RKA dan kontrak kinerja telah melalui koordinasi dengan pihak terkait yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan unit eselon IV KPPN Sijunjung. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus memiliki indikator kinerja yang selaras pada semua dokumen tersebut.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan perjanjian kinerja pada KPPN Sijunjung.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan/ Perjanjian Kinerja terbagi menjadi Peta strategis dan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan Penetapan/ Perjanjian Kinerja, Peta strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebagai berikut:



1. Pengelolaan *treasury* pemerintah yang akuntabel;

Pengelolaan *treasury* merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah.

Dalam rangka melakukan pengelolaan *treasury* pemerintah yang akuntabel, DJPb terus berupaya agar pengelolaan *treasury* dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan tersebut memiliki tujuan untuk dapat

mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran.

2. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien;

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang *agile*, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel;

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja di bawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan dan kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

4. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

5. Pengelolaan kas yang optimal;

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden.

Optimal memiliki arti bahwa pengelolaan kas ditujukan untuk mewujudkan asas efektif dan efisien serta memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya atas kas negara. Pengelolaan kas yang optimal dapat direpresentasikan dari akurasi antara perencanaan dan realisasi APBN dengan memenuhi seluruh target output/outcome yang telah direncanakan.

6. Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien;

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, dan memastikan pelaksanaan anggaran

pada Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/ kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

7. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel;

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas yang baik dari BPK.

8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif;

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

9. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Indikator Kinerja Utama merupakan penjabaran dari Peta strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian Kinerja KPPN Sijunjung Tahun 2022 tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%
		4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6b-N Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (Skala 4)
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N Organization	84,5
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Refinement Kontrak Kinerja 2022

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND- 4638/PB.1/2021 tanggal 16 November 2021 hal Persiapan Refinement IKU Kemenkeu-Two s.d. Five Kanwil DJPb dan Kemenkeu Three s.d Five KPPN Tahun 2022. Merujuk pada Kerangka Umum pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenkeu, dalam rangka penyusunan Kontrak Kinerja tersebut, perlu dilaksanakan proses refinement terhadap Kontrak Kinerja dari para pejabat/pegawai yang bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja dengan dinamika serta kebutuhan organisasi serta Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPb. Proses refinement Kontrak Kinerja

tahun 2022 di lingkungan DJPb dilakukan dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) DJPb 2020-2024, Cetak Biru Transformasi Kelembagaan DJPb, Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku, dan isu-isu strategis atau proses bisnis yang akan diimplementasikan di tahun 2022. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, kualitas dan target IKU pada Unit Kerja perlu disesuaikan dan disempurnakan seiring dengan perkembangan organisasi dan strategi organisasi yang digunakan oleh DJPb dalam upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Tabel 2.

**REKAPITULASI MASUKAN KONTRAK KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA: KPPN SIJUNJUNG**

NO	URAIAN IKU	PEMILIK IKU	USULAN TARGET
1	Nilai penguasaan terhadap hard competency	Seluruh pegawai	79
2	Persentase koreksi penerimaan satker yang diselesaikan tepat waktu	Pelaksana dan Kepala Seksi Bank	90%
3	Persentase data rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah yang diselesaikan secara tepat waktu	Pelaksana dan Kepala Seksi Bank	Dihapuskan
4	Persentase penyiapan bahan dalam rangka implementasi SAKTI sesuai tahapan	Pelaksana MS	Dihapuskan
5	Indeks kinerja layanan konsultasi stakeholder melalui aplikasi HAI CSO yang berkualitas, tepat waktu, dan memenuhi ekspektasi pengguna	Pelaksana MS	Dihapuskan
6	Persentase satker yang menyampaikan rencana penarikan dana secara tepat waktu	Pelaksana MS	90,05%
7	Persentase akurasi pendaftaran data kontrak tahunan	Pelaksana FO PD	98,25%
8	Persentase SPM Satker yang dikonversi secara akurat	Pelaksana FO PD	Dihapuskan
9	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Kepala Seksi dan Kepala Kantor	4,65
10	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Kepala Seksi PDMS dan Kepala Kantor	87,6
11	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Kepala Seksi PDMS dan Kepala Kantor	Dihapuskan
12	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	Kepala Seksi PDMS dan Kepala Kantor	83%
13	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	Kepala Kantor	Dihapuskan
14	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Kepala Kantor	Dihapuskan

Keterangan:

- Detail masukan direkam pada link: <https://tinyurl.com/RefinementKanwilKPPN2022>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai perjanjian/penetapan kinerja KPPN Sijunjung pada tahun 2022 memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis, dicapai dengan pelaksanaan atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPN Sijunjung tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum KPPN Sijunjung berhasil melebihi target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	92,60
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	99,40
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)	4,83
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,97%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%	95,63 %
		4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5	95,46

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	83%	100%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,27
		6b-N Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (Skala 4)	4
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	100
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25	4,00
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	100%
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N Organization	84,5	88.56
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	96.60
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	87.7
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	96.09%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	96,20
		9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	161,91 %

Bila dilihat dari capaiannya Ini berarti nilai NKO ditahun 2022 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dilihat

dari capaian, seluruh IKU telah melewati target, hanya saja beberapa target IKU di 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2021 sehingga indeks capaian yang dihasilkan berkurang. Berikut ini adalah Nilai NKO dari tahun 2018 s.d 2022 :

Tabel.4 Capaian NKO

	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian NKO	107,49%	106,00%	108.56%	107.99%	107,52

Uraian lebih lanjut dari hasil pencapaian pada Indikator Kinerja Utama KPPN Sijunjung selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel

Pengelolaan treasury merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (active cash management) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah.

Dalam rangka melakukan pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel, DJPb terus berupaya agar pengelolaan treasury dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan tersebut memiliki tujuan untuk dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran.

Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Belanja kontraktual
 - c. Penyelesaian tagihan
 - d. UP dan TUP
 - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
 - a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Formula:	<p>Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat KPPN (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN</p> $\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$
----------	---

Tabel 5. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L				
Target : 80%	Target : 88%	Target : 88%	Target : 89%	Target : 89%
Real: 89.26%	Real: 93.69%	Real: 94.32%	Real: 95.20%	Real: 95.60%
Nilai: 111.57%	Nilai: 106.45%	Nilai: 107.18%	Nilai: 106.96%	Nilai: 104.04%

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100	(Sangat Baik)
Level 3 = 80-94	(Baik)
Level 2 = 65-79	(Cukup)
Level 1 = 0-64	(Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2022, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D KPPN tahun 2021.

Formula:	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb
----------	--

Tabel 6. Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN				
Target : 93%	Target : 94	Target : 94	Target : 94	Target : 95
Real: 97.65%	Real: 99.27	Real: 99.08	Real: 99	Real: 99,40
Nilai: 105%	Nilai: 105.6%	Nilai: 105.4%	Nilai: 105.31%	Nilai: 104.63%

2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Sasaran strategis ini diwujudkan dalam satu indikator, yakni:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks kepuasan Satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan

bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana .

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Formula:	Indeks hasil survei kepuasan satker Hasil Indeks hasil survei kepuasan satker pada Nota Dinas Kepala KPPN Sijunjung nomor ND-189/WPB.03/KP.05/2021 hal Penyampaian Hasil Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN Sijunjung Semester I 2021
----------	--

Tabel 7. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN				
Target : 4.52	Target : 4.53	Target : 4.55	Target : 4.64	Target : 4.65
Real:4.68	Real: 4.71	Real: 4.73	Real: 4.78	Real: 4.83
Nilai: 105.53%	Nilai: 103.97%	Nilai: 103.95%	Nilai: 103.01%	Nilai: 103.87%

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPPN Sijunjung pada Satuan Kerja yang dilayani oleh KPPN Sijunjung diperoleh hasil sebesar 4.83 dari skala 5 atau dengan kata lain Satuan Kerja mempunyai kepuasan yang tinggi terhadap layanan KPPN. Peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder perlu terus ditingkatkan, agar indeks kepuasan satker terhadap layanan juga meningkat.

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja di bawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan.

Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta

merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel. Sasaran strategis ini diwujudkan dalam satu indikator, yakni:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank. SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan beberapa prasyarat kondisi.

Formula	$\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$
:	Ket : Kriteria SP2D sebagaimana prasyarat kondisi yang disebutkan pada Definisi IKU

Tabel 8. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu				
Target : 99.00%	Target : 99.40%	Target : 99.40%	Target : 99.4%	Target : 99.4%
Real:99.91%	Real: 99.90%	Real: 99.60%	Real: 99.78%	Real: 99.97%
Nilai: 100.91%	Nilai: 100.50%	Nilai: 100.20%	Nilai: 100.38%	Nilai: 100.57%

Target pada IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu sudah melampaui dari target. Masalah yang dihadapi pada tahun berjalan yaitu apabila tegangan listrik yang turun dan mesin genset tidak beroperasi secara baik serta Jaringan SPAN yang terkadang kurang stabil. Namun KPPN Sijunjung telah berupaya agar penerbitan SP2D berjalan dengan baik dengan cara Meningkatkan sinergi dan koordinasi di antara semua petugas pelayanan, agar penyelesaian SP2D dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan penolakan substantif dapat dicegah serta Memastikan mesin genset dalam keadaan baik apabila mati listrik di jam rawan penyelesaian SP2D.

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. Sasaran strategis ini diwujudkan dalam 3 (tiga) indikator, yakni:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2022 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkungannya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Formula:	Capaian Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2022 :	
	$\frac{\text{Jumlah Satker/User yang mengikuti tahapan}}{\text{Jumlah Satker/User yang memenuhi kriteria tahapan}}$	$\times \text{Bobot Tahapan} \times 100\%$

Tabel 9. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 3: Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI				
Target : 90%	Target : 65%	Target : 100%	Target : 100%	Target : 100%
Real:90%	Real: 95%	Real: 100%	Real: 100%	Real: 100%
Nilai: 100%	Nilai: 146.15%	Nilai: 100%	Nilai: 100%	Nilai: 100%

Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2022 dengan target 100%, dan telah berhasil dicapai oleh KPPN Sijunjung dengan persentase sebesar 100%. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya yaitu Komunikasi dan publikasi secara intens aplikasi SAKTI kepada satuan kerja.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPK/PPSPM Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM termasuk calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/ keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Pendaftaran Admin Satker SIMASPATEN
- Pendaftaran user peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada SIMASPATEN
- Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN terhadap beras usulan yang diajukan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM melalui SIMASPATEN; dan

- Sertifikat PNT/SNT yang diterbitkan untuk peserta yang telah memenuhi dengan status pada SIMASPATEN adalah Konversi dan Konversi Refreshment.

Formula:	'(persentase pendaftaran Admin Satker x bobot) + (persentase pendaftaran user peserta x bobot) + (persentase verifikasi usulan x bobot) + (persentase sertifikat PNT/SNT x bobot)
----------	---

Tabel 10 Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 2: Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan				
Target : -	Target : -	Target : -	Target : 30%	Target : 90%
Real: -	Real: -	Real: -	Real: 51.04%	Real: 95.63%
Nilai: -	Nilai: -	Nilai: -	Nilai: 105.33%	Nilai: 106.25%

Target IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan telah melampaui target. Hal yang akan dilakukan pada periode berikutnya yaitu peningkatan frekuensi sosialisasi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi standardisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula:	Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan $0 < x \leq 20$ = tidak efektif $20 < x \leq 40$ = kurang efektif $40 < x \leq 60$ = cukup efektif $60 < x \leq 80$ = efektif $80 < x \leq 100$ = sangat efektif
----------	--

Tabel 11 *Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan*

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan				
Target : 85	Target : 86	Target : 87	Target : 87.5	Target : 88.5
Real: 90.91	Real: 91.62	Real: 90.15	Real: 92.17	Real: 95.46
Nilai: 106.95%	Nilai: 106.53%	Nilai: 103.62%	Nilai: 105.33%	Nilai: 107.86%

5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden.

Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase akurasi perencanaan kas

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

satker.

PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Formula:	100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode)
----------	--

Tabel 12 Persentase akurasi perencanaan kas

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Persentase akurasi perencanaan kas				
Target : -	Target : -	Target : 80%	Target : 82%	Target : 83%
Real: -	Real: -	Real: 100%	Real: 100%	Real: 100%
Nilai: -	Nilai: -	Nilai: 100%	Nilai: 100%	Nilai: 100%

Target Presentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN Sijunjung pada tahun 2022 adalah 83% dengan realisasi adalah 100%. Belum ada kendala berarti, satker pada wilayah KPPN Sijunjung cenderung tidak ada yang mengajukan nilai sejumlah nilai/batas minimum perencanaan kas. Selanjutnya KPPN Sijunjung tetap akan Sosialisasi perencanaan kas termasuk Perkiraan Penarikan Dana Harian (PPDH) yang diproyeksikan selama setahun.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder .

Formula:	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas: (70% x nilai indeks A) + (30% x nilai indeks B)
----------	--

Tabel 13 Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 2: Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas				
Target : -	Target : -	Target : 3.00	Target : 3.15	Target : 3.15
Real: -	Real: -	Real: 3.92	Real: 4.00	Real: 4.00
Nilai: -	Nilai: -	Nilai: 120.00%	Nilai: 120.00%	Nilai: 120.00%

Target capaian Indeks Efektivitas Pengeluaran Kas pada tahun 2022 adalah 3.15 dengan skala tertinggi 4, dan telah berhasil dicapai oleh KPPN Sijunjung dengan indeks maksimal yaitu 4. Kecepatan Penyelesaian Retur sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder. Pada periode ini penyelesaian retur sudah terkendali dengan baik dan capaian IKU melebihi target. Namun Pembinaan kepada satker yang mengalami retur SP2D akan terus dilakukan.

6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran. Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa. Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel.

Formula:	"NKP TKDD = [0,10 (SYARAT) + (0,20 (PROYEKSI) + 0,30 (SPPSPM) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,10 (SALUR*)] x 100
----------	---

Tabel 14 Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 2: Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa				
Target : 70	Target : 75	Target : 80	Target : 90	Target : 90
Real: 94.5	Real: 94.92	Real: 99.47	Real: 99.32	Real: 99.27
Nilai: 120.00%	Nilai: 120.00%	Nilai: 120.00%	Nilai: 110.35%	Nilai: 110.30%

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks Implementasi Digipay

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Formula:	$\begin{aligned} & \text{Indeks Capaian Satker x 30\%} \\ & + \\ & \text{Indeks Capaian Vendor x 10\%} \\ & + \\ & \text{Indeks Capaian Transaksi x 60\%} \end{aligned}$
----------	--

Tabel 15 Indeks Implementasi Digipay

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Indeks Implementasi Digipay				
-	-	-	-	Target : 3%
-	-	-	-	Real: 4%
-	-	-	-	Nilai: 133.33%

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan.

Formula:	<p>Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output = Rata-Rata Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan dalam satu triwulan.</p> <p>Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan = $[(\text{Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler} \times 1,0) + (\text{Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan} \times 0,5)] / \text{Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output}$.</p>
----------	--

Tabel 16 Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 3: Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker				
Target : -	Target : -	Target : -	Target : 89	Target : 90
Real: -	Real: -	Real: -	Real: 100	Real: 100
Nilai: -	Nilai: -	Nilai: -	Nilai: 112.35%	Nilai: 111.11%

IKU Capaian Output merupakan IKU baru di tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai IKU Capaian Output telah melebihi target. Hal ini merupakan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja belanja pemerintah melalui pelaporan data capaian output Satker pada aplikasi OMSPAN.

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan,

penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas yang baik dari BPK. Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi MonSAKTI, meliputi persentase penyelesaian migrasi dan rekonsiliasi eksternal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan :

-Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI:

Seluruh satuan kerja (DIPA, Non DIPA) wajib melakukan migrasi data tahun 2021 ke Aplikasi SAKTI. Penyelesaian migrasi terdiri atas tiga modul, yaitu Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul GLP.

Nilai IKU diukur dari Persentase total penyelesaian migrasi seluruh modul. Realisasi dapat dilihat pada Aplikasi Mon SAKTI.

-Rekonsiliasi Ekternal :

1. Ketepatan waktu rekonsiliasi

Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

(dihitung berdasar jumlah satker yang mendapatkan SHR tidak kena sanksi pada periode rekonsiliasi berkenaan)

2. Keandalan rekonsiliasi:

Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) yang diterbitkan .

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2021 - Feb 2022

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2022

Tw 3 2022 = Jun - Agt 2022

Tw 4 2022 = Sep - Nov 2022

Formula:	Capaian IKU = (Indeks Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)
----------	--

Tabel 17 Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA				
Target : 98%	Target : 98.1%	Target : 98.1%	Target : 98.1%	Target : 3,25
Real: 100%	Real: 100%	Real: 99.47%	Real: 100%	Real: 4
Nilai: 102.04%	Nilai: 101.93%	Nilai: 101.39%	Nilai: 101.93%	Nilai: 123,07%%

Target capaian rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal pada tahun 2022 adalah 3,25, dan telah berhasil dicapai oleh KPPN Sijunjung dengan persentase sebesar 4.

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah.

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2022 merupakan rata-rata data bulan Desember 2021, bulan Januari dan Februari tahun 2022. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2022 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2022. dst.

Formula:	$\frac{\sum LPJ \text{ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum LPJ \text{ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$
----------	---

Tabel 18 *Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu*

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 2: Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu				
Target : 97%	Target : 97.5%	Target : 98.1%	Target : 98.00%	Target : 98.5%
Real: 100%	Real: 100%	Real: 100%	Real: 99.86%	Real: 100%
Nilai: 103.09%	Nilai: 102.56%	Nilai: 101.93%	Nilai: 101.89%	Nilai: 101.52%

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 capaian IKU LPJ sudah tercapai melampaui target. Realisasi sudah melampaui target, namun tetap harus diupayakan meningkat di periode berikutnya. Terlebih lagi banyak satker yang mengalami perubahan rekening menjadi rekening VA, sedikit banyak ikut mempengaruhi penyampaian LPJ.

8. Sasaran Strategis (SS) 8: 8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Formula:	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb
----------	---

Tabel 19 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization				
Target : 81	Target : 83	Target : 83	Target : 84	Target : 84,5
Real: 84.61	Real: 86.80	Real: 87.88	Real: 89.02	Real: 88,56
Nilai: 104.45%	Nilai: 104.57%	Nilai: 105.87%	Nilai: 105.97%	Nilai: 104.80%

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- i. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2022.
- ii. Nilai NKO Unit periode tahunan 2021.

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Formula:	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb
----------	---

Tabel 20 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2021
IKU 2: Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal				
Target : 96	Target : 75	Target : 80	Target : 83	Target : 85
Real: 100	Real: 97.46	Real: 93.65	Real: 95.208	Real: 96.60
Nilai: 104.16%	Nilai: 104.16%	Nilai: 117.06%	Nilai: 114.7%	Nilai: 113.64%

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Nilai *hard competency* dinyatakan baik apabila para pegawai mampu mencapai nilai minimal 78. Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN.

Formula:	$\frac{\text{Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai KPPN}}{\text{Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency}}$
----------	---

Tabel 21 Nilai rata-rata hard competency pegawai

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 3: Nilai rata-rata hard competency pegawai				
Target : 77	Target : 77	Target : 77	Target : 78	Target : 78
Real: 90.33	Real: 89.50	Real: 86.57	Real: 83.2	Real: 87,7
Nilai: 117.31%	Nilai: 116.23%	Nilai: 112.42%	Nilai: 106.67%	Nilai: 112.43%

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23

Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Formula:	Perhitungan realisasi IKU =	
	Capaian IKU PKPA Triwulan I	= Capaian IKPA Januari s.d. Maret
	Capaian IKU PKPA Triwulan II	= Capaian IKPA Januari s.d. Juni
	Capaian IKU PKPA Triwulan III	= Capaian IKPA Januari s.d. September
	Capaian IKU PKPA Triwulan IV	= 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Tabel 22 *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN*

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 1: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN				
Target : 95.00%	Target : 95.00%	Target : 95.00%	Target : 95.5%	Target : 95.5%
Real: 96.47%	Real: 96.80%	Real: 96.80%	Real: 97.28%	Real: 96.09%
Nilai: 101.54%	Nilai: 101.89%	Nilai: 101.89%	Nilai: 101.86%	Nilai: 100.61%

Target kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun 2022 adalah 95.5%, dan telah berhasil dicapai oleh KPPN Sijunjung dengan persentase sebesar 96.09%.

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan

kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Formula:	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB
----------	---

Tabel 23 Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2021
IKU 2: Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB				
Target : -	Target : -	Target : 81	Target : 82	Target : 83
Real: -	Real: -	Real: 95	Real: 94	Real: 96,2
Nilai: -	Nilai: -	Nilai: 101.89%	Nilai: 101.86%	Nilai: 101.86%

Target nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB pada tahun 2022 adalah 83 dengan realisasi KPPN Sijunjung sebesar 96,2. IKU ini periode pelaporannya tahunan (pada Triwulan IV), namun upaya untuk mencapai target IKU tersebut dilakukan sejak awal tahun. Rencana aksi pada periode berikutnya yaitu mengikutkan operator dalam bimtek penyusunan LK serta mengupayakan keakuratan dalam pelaksanaan realisasi anggaran agar berimbang pada keakuratan dalam LK.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

Formula:	$\frac{\text{Realisasi 1} + \text{Realisasi 2}}{2}$
----------	---

Tabel 24 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

KK K3-2018	KK K3-2019	KK K3-2020	KK K3-2021	KK K3-2022
IKU 3: Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				
Target : -	Target : -	Target : -	Target : 82	Target : 100%
Real: -	Real: -	Real: -	Real: 94	Real: 161,91%
Nilai: -	Nilai: -	Nilai: -	Nilai: 101.86%	Nilai: 120%

B. REALISASI ANGGARAN

1. Perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (perjenis belanja) beberapa tahun terakhir;

Pada tahun 2022 KPPN Sijunjung mendapatkan alokasi dana DIPA sebagai sumber pembiayaan program/kegiatan sebesar Rp1.260.124.000,- yang terdiri dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp156.568.000,- belanja barang sebesar Rp1.065.056.000,- dan belanja modal Rp38.500.000,-

Realisasi Belanja KPPN Sijunjung pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.251.379.955,- atau 99,31% dari total pagu anggaran KPPN Sijunjung sebesar Rp1.260.124.000,- Realisasi anggaran KPPN Sijunjung tahun anggaran 2022 per jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 25
Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
KPPN Sijunjung
TA 2019-2022

No	Tahun		Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)	Jumlah
1.	2018	Pagu	170.524.000	1.201.945.000	7.500.000	1.379.969.000
		Realisasi	169.894.000	1.199.777.677	7.480.000	1.377.151.677
		Persentase	99,63%	99,82%	99,73%	99,80%
		Sisa	630.000	2.167.323	20.000	2.817.323
2.	2019	Pagu	151.014.000	1.125.880.000	363.764.000	1.640.658.000
			0	0	0	0

		Realisasi	142.879.00 0	1.111.750.21 9	363.764.00 0	1.618.393.21 9
		Persentase	94,61 %	98.75%	100 %	98,64 %
		Sisa	8.135.000	14.129.781	0	22.264.781
3.	2020	Pagu	152.542.00 0	953.540.000	49.354.000	1.155.436.00 0
		Realisasi	136.696.00 0	934.555.700	49.230.000	1.120.481.70 0
		Persentase	89,61%	98,01%	99,75%	96,97%
		Sisa	15.846.000	18.984.300	124.000	34.954.300
4.	2022	Pagu	156.568.00 0	1.065.056.00 0	38.500.000	1.260.124.00 0
		Realisasi	155.053.00 0	1.057.826.95 5	38.500.000	1.251.379.95 5
		Persentase	99,03%	99,32%	100%	99,31%
		Sisa	1.515.000	7.229.045	0	8.744.045

2. Perbandingan pagu dan realisasi belanja unit tahun 2022 perkegiatan/output;

Sedangkan realisasi anggaran KPPN Sijunjung tahun anggaran 2022 per kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 26
Pagu dan Realisasi Anggaran KPPN Sijunjung TA 2022
Per Kegiatan

No	Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu	Realisasi
1.	4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4.166.000	3.636.000
2.	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	9.994.000	9.967.000

3.	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	22.888.000	22.857.000
4.	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	5.932.000	5.822.000
5.	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	4.166.000	4.128.000
6.	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	3.000.000	3.000.000
7.	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	1.500.000	1.500.000
8.	4715.EBA	Kerumahtanggaan	51.200.000	51.084.000
9.	4715.EBA	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12.748.000	12.418.228
10.	4715.EBA	Layanan Perkantoran	924.118.000	919.029.477
11.	4715.EBB	Peralatan Fasilitas Perkantoran	38.500.000	38.500.000
12.	4715.EBD	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	600.000	500.000
13.	4715.EBD	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	6.000.000	5.990.250
14.	4718.BMB	Pembinaan/Edukasi Publik	3.000.000	2.431.500
15.	4718.BMB	Kehumasan	6.000.000	5.990.000
16.	4719.EBA	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	1.500.000	1.462.500
17.	4719.EBA	Layanan Perkantoran	156.568.000	155.053.000
18.	4719.EBC	Pengembangan SDM	4.078.000	4.075.000

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber

daya manusia. Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pagu dan realisasinya. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Berdasarkan tabel diatas mengenai pagu dan realisasi anggaran KPPN Sijunjung , pagu belanja dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja hasilnya sudah cukup efisien dengan tingkat pencapaian 90%-100%.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan)

Sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Capaian efisiensi tersebut dapat dilihat pada halaman website monev.anggaran.kemenkeu.go.id (SMART-DJA). Berdasarkan dashboard kinerja penganggaran pada situs tersebut, capaian efisiensi untuk KPPN Sijunjung adalah 11,19 dari nilai maksimal 20.

Selain hal tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan office automation sebagai upaya untuk mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi atas belanja birokrasi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil untuk pencapaian suatu output yang sama atau peningkatan capaian output dengan realisasi anggaran yang sama.

C. Kinerja Lainnya

Dari evaluasi dan analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disampaikan bahwa semua kinerja utama maupun kinerja lainnya yang ditetapkan untuk KPPN Sijunjung telah melebihi targetnya masing-masing. Capaian pada periode ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja KPPN Sijunjung untuk periode berikutnya.

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. KONCO AREK – Konfirmasi dan Pencocokan Data Rekening

Inovasi ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada pengguna layanan dalam rangka akselerasi dan akurasi penyerapan anggaran. Konco Arek merupakan inovasi sinergi antara KPPN, pengguna layanan, dan perbankan. Inovasi ini bentuk komitmen KPPN Sijunjung untuk mewujudkan zero retur. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan KPPN Sijunjung dapat menjadi Konco Arek (Sahabat Karib dalam Bahasa Minang) *Stakeholders* terkait.

Inisiasi atas inovasi ini muncul karena fenomena rekening tidak aktif, kesalahan pencatatan rekening, banyaknya jumlah penerima, dan kesalahan teknis perbankan. Hal ini menyebabkan terjadinya perlambatan penyerapan anggaran.

Inovasi Konco Arek ini sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan pada KPPN Sijunjung, karena inovasi ini dirancang untuk akurasi dan kecepatan penyaluran SP2D kepada pengguna layanan.

b. MANDANGA ONLINE – Manajemen Pengaduan Berintegritas Online

Manajemen Pengaduan Berintegritas Online atau dikenal sebagai MANDANGA ONLINE merupakan salah satu bentuk sarana pengaduan online yang dikembangkan oleh KPPN Sijunjung dengan tujuan menampung segala aduan dari satker/mitra kerja KPPN Sijunjung tanpa harus datang langsung ke KPPN Sijunjung. Dengan adanya inovasi ini diharapkan tidak adanya batasan penyampaian pengaduan meskipun aturan tatap muka diterapkan semenjak masa pandemi Covid-19 dimulai sampai dengan saat ini. Penerapan inovasi ini juga bertujuan agar segala bentuk aduan dapat ditangani secara cepat dan tepat serta memberikan dorongan agar KPPN Sijunjung dapat berbenah diri menjadi lebih baik kedepannya.

Inovasi ini decetuskan atas dasar belum adanya sarana pengaduan online yang langsung dikelola oleh KPPN Sijunjung sehingga pengawasan atas potensi pengaduan yang akan timbul di masa yang akan datang dirasa masih kurang. Manfaat utama inovasi ini yaitu; 1. Mempermudah satker mengajukan aduan/laporan ke KPPN Sijunjung. 2. Menyebarkan semangat zona integritas ke lingkungan kerja satker.

c. BAKADAI – Bantu Kelola Digipay

Digipay merupakan system aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan tiga bank Himbara. Sehubungan dengan itu, terciptalah sebuah inovasi yaitu, Bakadai, inovasi dalam bentuk diskusi dengan menggandeng Satker dan Dinas Koperindag mengenai pengelolaan digipay kepada vendor, mengajak satker untuk aktif berperan menghimbau UMKM agar mengurangi transaksi tunai (cashless). Dengan adanya bakadai, diharapkan dapat memberikan solusi kepada satker atas kendalakendala yang ditemukan dalam mengelola digipay.

Inisiatif dimunculkannya inovasi ini yaitu Satker belum begitu paham terkait pengelolaan digipay.

BAKADAI melibatkan seluruh pejabat/pegawai, karena pada kegiatan BAKADAI baik pelaksana, pejabat pengawas sampai dengan kepala kantor berperan dalam mendukung acara tersebut. Selain itu satker juga berperan untuk memberikan masukan yang positif dalam kerangka perbaikan pelayanan KPPN Sijunjung.

Manfaat utama inovasi ini adalah; 1. Diperoleh feedback yang sangat bermanfaat dari satker sebagai bahan perbaikan pelayanan KPPN Sijunjung. 2. Menyebarkan semangat kepada satkersatker untuk mengajak vendor-vendor dalam penggunaan digipay.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

a. Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2022 Tema “Bijak Bermedia Sosial”



Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 atas dasar Surat Undangan Kepala KPPN Sijunjung nomor UND-460/KPN.0305/2022 tanggal 01 September 2022 Hal Antikorupsi Tahun 2022 Tema “Bijak Bermedia Sosial”.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan berbagai macam hal

antara lain: dampak positif dan negatif Bermedia Sosial, Maksud dan Tujuan penggunaan Bijak bermedia sosial dan ruang Lingkup dari bijak bermedia sosial.

Pesan Menteri Keuangan Kebijakan Bermedia Sosial Terkait media sosial: *“Manfaatkan era digital sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri, mencerdaskan, dan meningkatkan daya kritis yang konstruktif. Selalu menjaga etika, baik di dalam pergaulan sosial secara langsung maupun melalui media sosial”. “Dalam perjalanan hidup, kalau kalian melihat kekurangan, maka perbaiki. Tidak usah mengeluh, apalagi mencaci di media sosial. Jadilah pribadi yang kritis tanpa menjadi sinis. Jadi generasi yang positif dan konstruktif, bukan destruktif”.*

b. GKM Sosialisasi Antikorupsi

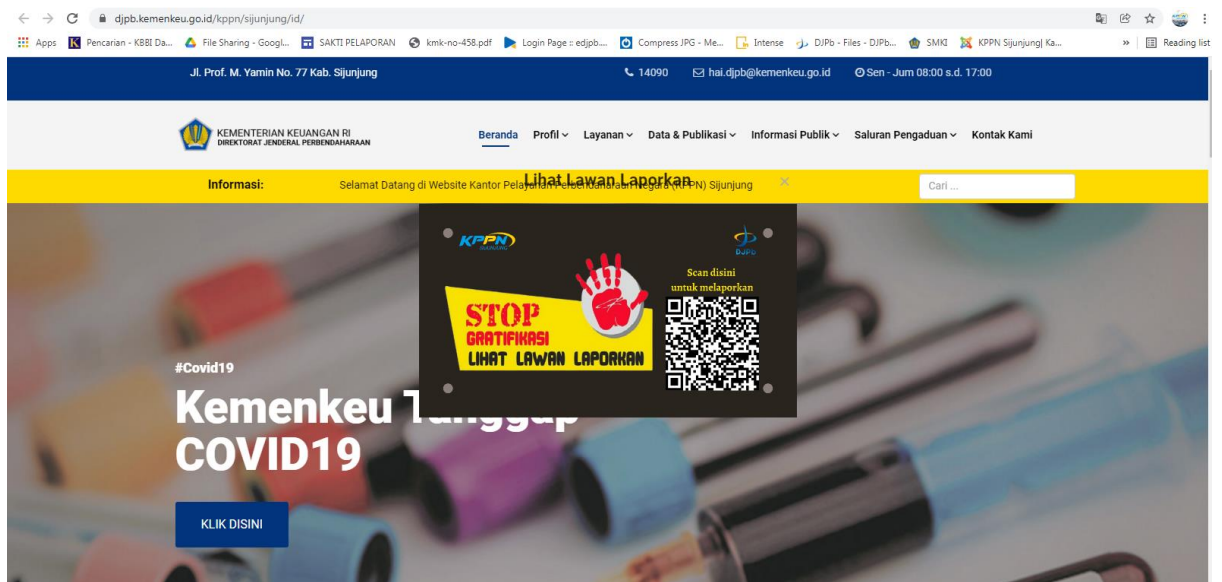


Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 pukul 16:30 WIB s.d Selesai bertempat di Ruang Rapat KPPN Sijunjung atas dasar Nota Dinas Kepala KPPN Sijunjung Nomor UND-552/KPN.0305/2022 tanggal 14 Oktober 2022 hal Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2022.

Topik yang dibahas pada acara ini antara lain; Latar Belakang Kerangka Kerja Integritas, Tujuan Kerangka Kerja Integritas, Manfaat Kerangka Kerja Integritas, dan Komitmen Pimpinan Kerangka Kerja Integritas.

c. Publikasi melalui Sosial Media

Publikasi pada sosial media merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan pada era digital dalam memberitahukan informasi. KPPN Sijunjung memiliki berbagai media sosial diantaranya *Instagram*, *Youtube*, *Facebook*, hingga *Website*. Seluruh media sosial dikerahkan untuk melakukan publikasi terkait dengan seluruh pelayanan hingga sarana informasi dan pengaduan terkait dengan pencegahan korupsi. Kegiatan sosialisasi pada satker yang berkaitan dengan pencegahan gratifikasi akan di update pada media *instagram* dan *facebook*. Pada media website juga dibukakan akses untuk saluran pengaduan. Di halaman awal website terdapat barcode berisi pintasan informasi saluran pengaduan.



d. Banner dan Digital Banner di area kantor

Dalam memperkuat peranan KPPN Sijunjung dalam menciptakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, KPPN Sijunjung telah melakukan himbuan dari berbagai media seperti banner, pamflet pada digital banner, dll di KPPN Sijunjung sebagai lokasi pelayanan.



Banner yang dipasang di depan gedung kantor bertuliskan “Selamat Datang di Zona Integritas KPPN Sijunjung”. Banner ini di pasang di bagian yang mudah dibaca oleh tamu, stakeholder/para pemangku kepentingan yang datang melalui pintu masuk KPPN dalam upaya untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Didalam ruangan pelayanan terdapat digital banner yang akan ditayangkan media yang berisi himbauan terkait pemberantasan korupsi. Budaya anti korupsi harus terus menjadi bagian dari KPPN Sijunjung secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Budaya Anti Korupsi bisa diwujudkan dengan adanya para pegawai yang bersih, andal, dan bekerja sepenuh hati dalam memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga berdampak pada implementasi reformasi birokrasi yang signifikan.



e. DUTA INTEGRITAS (Ambo Ba Integritas)

Duta integritas ini berperan untuk menyebarkan semangat integritas di unit kerja masing-masing dengan harapan semangat berintegritas itu dapat mewujudkan unit kerja-unit kerja yang anti KKN, gratifikasi dan Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan integritas. Ambo ba Integritas mengusung semangat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh KPPN Sijunjung sudah tidak ada lagi pungli maupun Tindakan tidak berintegritas. Oleh karena itu peran agen-agen ini sangat penting untuk menyebarkan semangat tersebut ke unit kerjanya.

Para petugas satker yang ditunjuk ditetapkan dalam surat keputusan Kepala KPPN Sijunjung dan kemudian di lantik menjadi duta integritas pada saat acara NGOBRAS. Kemudian para petugas satker yang telah ditunjuk ini

memiliki tugas untuk menyebarkan virus integritas di unit kerja masing-masing.

Lesson learnt dari Duta Integritas yang didapat antara lain:

1. Menggunakan kearifan lokal dalam menyebarkan virus integritas.
2. Membantu satker dalam rangka pembangunan zona integritas di lingkungan kerjanya.
3. Peningkatan kinerja KPPN dan satker, karena satker merasa diperhatikan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan feedback.

3. Penghargaan

a. Pertama KPPN dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022



Penghargaan Peringkat Pertama KPPN dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022, diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

b. KPPN dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2022



Penghargaan Peringkat Pertama KPPN dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2022, diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

c. Penilaian Laporan Keuangan Unit Auntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah Tahun 2021



Penghargaan Peringkat Pertama dalam Penilaian Laporan Keuangan Unit Auntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah Tahun 2021 Kategori KPPN Tipe A2 Dengan Nilai 99.40, diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

d. Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB Periode Tahun Anggaran 2021

Penghargaan Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB Periode Tahun Anggaran 2021, diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat



e. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



Penghargaan Negara Dana Abyakta Menteri Keuangan Republik Indonesia Berkolaborasi dengan Tim Penilai Nasional: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Sijunjung ini menyajikan capaian kinerja KPPN Sijunjung selama Tahun 2022. Capaian kinerja diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja dan rencana kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan KPPN Sijunjung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyusunan LAKIN juga telah sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*). Capaian kinerja organisasi KPPN Sijunjung tahun 2022 telah dilaksanakan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Untuk perencanaan kinerja pada masa yang akan datang dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM dan mendukung capaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang
- b. Meningkatkan volume pelaksanaan sosialisasi, bimtek dan layanan konsultasi untuk satuan kerja dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Sijunjung;
- c. Meningkatkan dan menjaga ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja layanan dengan baik;
- d. Menjalankan proses *reward* dan *punishment* secara berimbang dan proporsional, baik di lingkup internal maupun eksternal kantor layanan.
- e. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait capaian IKU yang akan dicapai untuk tahun berkenaan agar bisa mengantisipasi jika terdapat kendala yang dihadapi.

LAMPIRAN



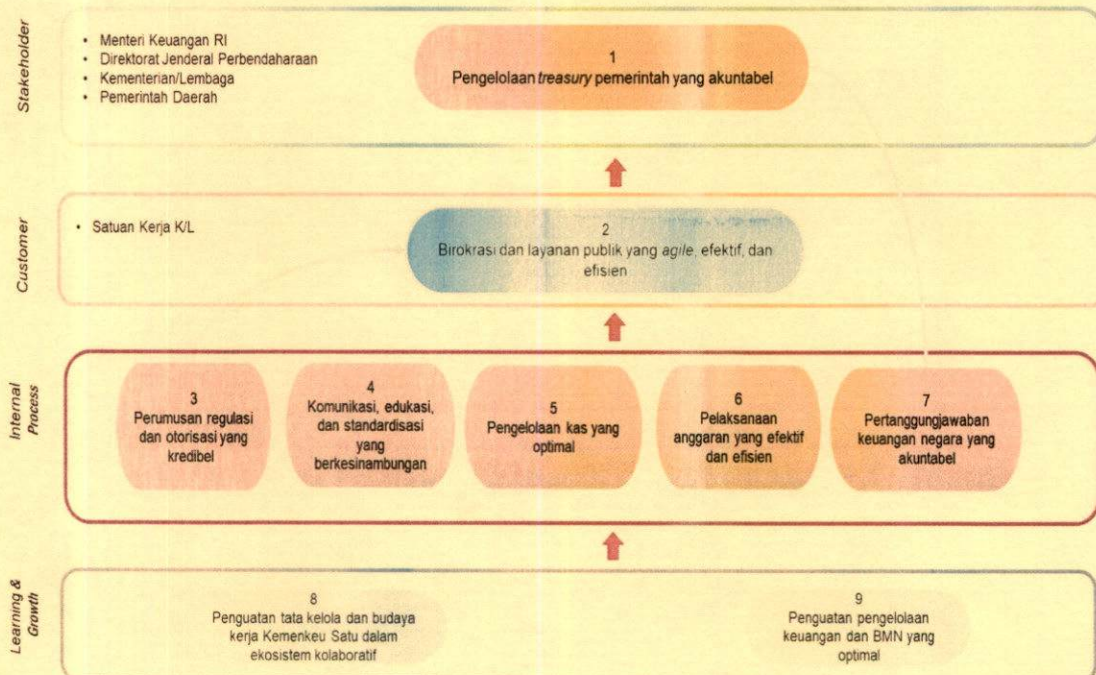
KONTRAK KINERJA
NOMOR : 077/PB.12/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SIJUNJUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sijunjung, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SIJUNJUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%
		4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (Skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6b-N Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (Skala 4)
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (Skala 4)
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84,5
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

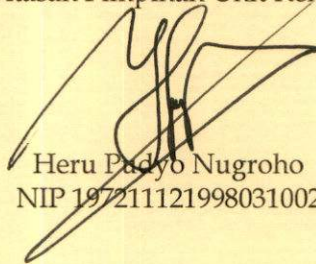
Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Anggaran

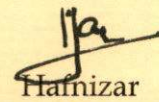
Rp1.260.124.000

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Heru Padyo Nugroho
NIP 197211121998031002

Padang, 31 Januari 2022
Pimpinan Unit Kerja,

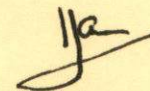


Hafnizar
NIP 196503131985032010

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	90	90	90	90	90	90
VII	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel							
7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%
VIII	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84,5	84,5
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	85	85
8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
IX	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	83	83
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Padang, 31 Januari 2022

PNS yang dinilai,



Hafnizar

NIP 196503131985032010

SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022

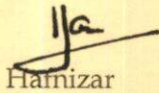
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KERJA	
NAMA	Hafnizar	NAMA	Heru Pudyo Nugroho
NIP	196503131985032010	NIP	197211121998031002
PANGKAT/GOL RUANG	Penata Tk.I/(III/d)	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah
UNIT KERJA		UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		Nilai kualitas LK BUN KPPN	95
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%
		Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (Skala 4)
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (Skala 4)
		Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (Skala 4)
		Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84,5

		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
B. KINERJA TAMBAHAN			
1	-	-	-

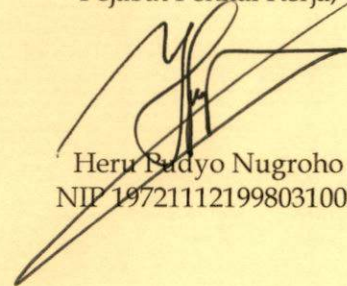
Padang, 31 Januari 2022

Pegawai yang dinilai,

Pejabat Penilai Kerja,



Hamizar
NIP 196503131985032010



Heru Badyo Nugroho
NIP 197211121998031002

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	SS: Penguatan tala kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i>	Q2: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q2: 40%	April s.d. Desember 2022	Kepala KPPN	
				Q3: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q3: 60%			
				Q4: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q4: 80%			
				Target: Pemenuhan minimal masing-masing indikator <i>self assessment</i> 80%				
2.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Persentase pemenuhan implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Q1: Capaian tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Q1: 50%	Triwulan I 2022 s.d. Triwulan IV 2022	Kepala KPPN	
				Q2: Capaian tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Q2: 65%			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
3.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Penyusunan Laporan RPA Tingkat KPPN	Tersusunnya Laporan RPA tingkat KPPN Target: Tersusunnya Laporan RPA Tingkat KPPN periode semesteran	Q3: Capaian tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Q3: 80%	Kepala KPPN	
				Q4: Capaian tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Q4: 90%		
				Semester I: Penyusunan Laporan RPA tingkat KPPN Periode Semester II Tahun 2021	Februari 2022		
				Semester II: Penyusunan Laporan RPA tingkat KPPN Periode Semester I Tahun 2022	Agustus 2022		

Padang, 31 Januari 2022

PNS yang dinilai,



NIP 196503131985032010

**Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Kalender Kegiatan
pada KPPN Sijunjung tahun 2022**

No	Bulan	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Deskripsi Singkat Kegiatan dan Peserta	Lokasi	Keterlibatan Kepala Kantor
1.	Januari	CD.6212.FAL.004	- Sosialisasi Sistem Billing Perbendaharaan	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung - Bank, BPJS Kesehatan dan Pemda lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	Ya
		CD.6212.FAH.001	- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker TA 2021	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
		CD.6212.FAL.004	- Monev IKPA Semester II TA 2021	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
		CD.4803.FAE.001	- FGD dengan Penyalur kredit Umi	- Peserta Pegadaian, BAV dan PNM	Aula KPPN Sijunjung	
		CD.6212.FAL.004	- Pendampingan SAKTI	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
		WA.4719.EBC.001	- Service Excellence TA 2022 (BSI)	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
		WA.4719.EBC.001	- In House Training	- Pelatihan pembuatan video dan editing selama 3 jam hari Jumat 7 Desember 2022 diikuti oleh seluruh pegawai - Seluruh pegawai KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	
		WA.4715.EBA.994	- Pengadaan baju seragam pegawai dan satpam	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	
		WA.4715.EBA.994	- Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2022	- Seluruh pegawai KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
		WA.4719.EBC.001	- Best Employee Triwulan IV Tahun 2021	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	

		WA.4715.EBA.994	- Pembuatan Video Publikasi Kinerja APBN	- 1) Silokek (Sabtu 7 Desember 2022 + Raw data Affan) 2) Perpustakaan Sawahlunto (Senin 9 Desember 2022) 3) Pasar Sijunjung (Kamis 5 Januari 2022) - Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto	
		CD.6213.FAL.003	- Penyerahan penghargaan apresiasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2021	- Pemda Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	
2.	Februari	CD.6212.FAL.004	- FGD Percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2022	- Seluruh OPD dan Pemdes yang mendapatkan alokasi DAK Fisik dan Dana Desa	Aula KPPN Sijunjung	Ya
		CD.6212.FAL.004	- MoU dengan Pemerintah daerah lingkup KPPN Sijunjung	- Pemda lingkup KPPN Sijunjung	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto	
3.	Maret	CD.6212.FAL.004	- Pendampingan SAKTI	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	Ya
		WA.4719.EBC.001	- Best Employee Triwulan I Tahun 2022	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	
		CD.6213.FAL.001	- Monev Bank / Pos Persepsi	- Bank / Pos Persepsi lingkup KPPN Sijunjung	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto	
4.	April	WA.4719.EBC.001	- In House Training Pelatihan literasi / public speaking	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	Ya

5.	Mei	CD.6212.FAL.004	- FGD Percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2022	- Seluruh OPD dan Pemdes yang mendapatkan alokasi DAK Fisik dan Dana Desa	Aula KPPN Sijunjung	Ya
		CD.4803.FAE.001	- Monev Pembiayaan UMi	- Mitra kerja Pembiayaan UMi	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto	
6.	Juni	WA.4719.EBC.001	- Best Employee Triwulan II Tahun 2022	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	Ya
		CD.6213.FAL.001	- Monev Bank / Pos Persepsi	- Bank / Pos Persepsi lingkup KPPN Sijunjung	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto	
7.	Juli	CD.6212.FAH.001	- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Semester I TA 2022	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	Ya
		CD.6212.FAL.004	- Monev IKPA Semester I TA 2022	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
		CD.6212.FAL.004	- Pendampingan SAKTI (Penyusunan Laporan Semester I TA 2022)	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
8.	Agustus	WA.4715.EBA.994	- Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	
9.	September	WA.4719.EBC.001	- Best Employee Triwulan III Tahun 2022	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	Ya
		CD.6213.FAL.001	- Monev Bank / Pos Persepsi	- Bank / Pos Persepsi lingkup KPPN Sijunjung	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto	

10.	Oktober	CD.6212.FAH.001	- Sosialisasi LLAT 2022	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
11.	November	CD.4803.FAE.001	- Monev Pembiayaan Umi	- Mitra kerja Pembiayaan UMi	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto	Ya
		CD.6212.FAH.001	- Penyerahan DIPA 2023	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
		CD.6212.FAH.001	- Monev Pelaksanaan Anggaran	- Seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	
12.	Desember	CD.6212.FAL.004	- FGD dengan Bank/Pos Persepsi terkait LLAT TA 2022	- Bank/Pos Persepsi lingkup KPPN Sijunjung	Aula KPPN Sijunjung	Ya
		WA.4719.EBC.001	- Best Employee Triwulan IV Tahun 2022	- Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Sijunjung	KPPN Sijunjung	
		CD.6213.FAL.001	- Monev Bank / Pos Persepsi	- Bank / Pos Persepsi lingkup KPPN Sijunjung	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto	

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN SIJUNJUNG
JABATAN : KEPALA KANTOR
PERIODE PELAPORAN : s.d. TRIWULAN IV Tahun 2022 (*Comprehensive Report*)

No.	Uraian I K U	Q1		Q2		s.d Q2		Q3		s.d Q3		Q4		Y-2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	94,45	89	90,87	89	92,66	89	91,87	89	92,40	89	93,22	89	92,60
2	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	99,40	95	99,40
3	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	-	4,65	4,83	4,65	4,83	-	-	4,65	4,83	-	-	4,65	4,83
4	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,86%	99,40%	100%	99,40%	99,93%	99,40%	100,00%	99,40%	99,95%	99,40%	100,00%	99,40%	99,97%
5	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	21%	21%	46%	46%	46%	46%	76%	76%	76%	76%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	50%	85,09%	65%	85,73%	65%	85,73%	80%	95,51%	80%	95,51%	90%	95,63 %	90%	95,63 %
7	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	-	88,5	94,74	88,5	9474,00%	-	-	88,5	94,74%	88,5	96,18	88,5	95,46
8	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	83%	100%	83%	100%	83%	100%	83%	100%	83%	100%	83%	100%	83%	100%
9	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4	3,15	4	3,15	4	3,15	4	3,15	4	3,15	4	3,15	4
10	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,33	90	99,31	90	99,32	90	99,09	90	99,24	90	99,34	90	99,27
11	Indeks implementasi Digipay	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
12	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100
13	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25	4	3,25	N/A	3,25	N/A	3,25	4,00	3,25	4,00	3,25	4,00	3,25	4,00
14	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5	100%	98,5	100%	98,5	100%	98,5	100%	98,5	100%	98,5	100%	98,5	100%
15	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	88,56	84,5	88,56

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN SIJUNJUNG
JABATAN : KEPALA KANTOR
PERIODE PELAPORAN : s.d. TRIWULAN IV Tahun 2022 (*Comprehensive Report*)

No.	Uraian I K U	Q1		Q2		s.d Q2		Q3		s.d Q3		Q4		Y-2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
16	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	96.60	85	96.60
17	Nilai rata-rata hard competency pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	87.7	78	87.7
18	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%	100%	95.5%	99,90%	95.5%	99,90%	95.5%	99.93%	95.5%	99.93%	95.5%	96.09%	95.5%	96.09%
19	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	96,20	83	96,20
20	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	133,33%	50%	133,33%	50%	133,33%	85%	133,33%	85%	133,33%	100%	161,91%	100%	161,91%

*Keterangan ada pada dokumen RAW Data IKU

Sijunjung, 16 Januari 2022

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Hafnizar

NIP 196503131985032010



MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE KPPN SIJUNJUNG TAHUN 2022

Unit :Kepala KPPN Sijunjung

Kemenkeu-Three			Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five								
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU		
1	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	89%	Kasi PDMS	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	89%	Cascading Peta	Average	Proxy Low	-	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	-	-	-	-	-		
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L			89%	Cascading Peta	Average	Proxy Low	-	-	-		-						
	Nilai kualitas LK BUN KPPN	95	Kasi VeraKI		Nilai kualitas LK BUN KPPN	95	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Tari		Persentase penyusunan konsep LK Kuasa BUN KPPN secara tepat waktu	100%	Non Cascading	-	Proxy High		
2	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	4,65 (Skala 5)	KSU,Kasi Veraki,Kasi Bank	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)	Cascading Peta	Average	Exact Moderate	Hafid (Jabatan Fungsional)	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan survei kepuasan pengguna layanan KPPN	3,15 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy High		
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	99.40%	Kasi PDMS,Kasi Bank	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Adit	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase akurasi verifikasi Payment Process Request (PPR)	100%	Non Cascading	-	Proxy High		
										Nabila		Persentase data SPM yang divalidasi secara akurat	98,5%	Non Cascading	-	Proxy High		
										Rozi		Persentase penyelesaian review SPM yang akurat dan tepat waktu	98,5%	Non Cascading	-	Proxy High		
4	Komunikasi,edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	100%	Kasi PDMS	Komunikasi,edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implemen Aplikasi SAKTI	100%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Vivit	Komunikasi,edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase penyiapan bahan dalam rangka implementasi SAKTI sesuai tahapan	100%	Non Cascading	-	Proxy High		
		90%			Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	-	-	-									
		88.5%			Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (skala 5)	Non Cascading	-	Proxy dan Moderate	Hafid (Jabatan Fungsional)		Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi kegiatan pembinaan/ bimbingan teknis di bidang perbendaharaan	88,5	Non Cascading	-	Proxy Moderate		
5	Pengelolaan Kas yang Optimal	83%	Kasi PDMS, Kasi Bank	Pengelolaan Kas yang Optimal	Persentase akurasi Perencanaan Kas	83%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Vivit	Pengelolaan Kas yang Optimal	Persentase satker yang menyampaikan rencana penarikan dana secara tepat waktu	90%	Non Cascading	-	Proxy Moderate		
		3.15%			Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	Indeks ketepatan waktu penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D	Indeks 3	Non Cascading	-	Proxy High								
						Indeks penyelesaian penerbitan SPP-Retur SP2D	3 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate								
6	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	90	Kasi Bank dan Kasi Vera-KI	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	Cascading Peta	Raw Data	Proxy Moderate	Tari	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer ke Daerah dan Dana Desa	Indeks 3	Non Cascading	-	Proxy Moderate		
														Indeks penyusunan LK Tingkat UAKPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara tepat waktu	Indeks 3,15	Non Cascading	-	Proxy Moderate
																Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Indeks 3	Non Cascading
		3 (skala 4)	Indeks Implementasi Digipay	3 (skala 4)	Cascading Peta	Average	Proxy Law	-	-	-	-	-	-	-				

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE KPPN SIJUNJUNG TAHUN 2022

Unit :Kepala KPPN Sijunjung

Kemenkeu-Three			Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3.25	Kasi Vera KI	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3.25	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Tari	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	Indeks satker yang melakukan upload data rekonsiliasi UAKPA secara tepat waktu	Indeks 3,5	Non Cascading	-	Proxy Moderate
		Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.5%		Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.5%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Tari	Indeks satker yang menyampaikan data LPJ Bendahara secara tepat waktu		Indeks 3,25 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate	
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	84.5	KSU	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategi Focused Organization	84.5	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Achy	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja	Indeks 3,5 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy High	
	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	Kasi Vera KI		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Endrawati		Indeks penyusunan konsep rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Indeks 3	Non Cascading	-	Proxy High	
	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Seluruh Kepala Seksi		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Seluruh Pelaksana		Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	Cascading Peta	Average	Proxy High	
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%	KSU	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Safna	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Penerbitan SPM secara akurat	100%	Cascading Non Peta	Average	Proxy High
		Indeks penyusunan LPJ Bendahara KPPN secara akurat dan tepat waktu	3,25 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate											
		Indeks penyampaian Laporan Keuangan UAKPA KPPN secara tepat waktu	3,5 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy High											
		Indeks penyampaian Laporan Keuangan UAKPB KPPN secara tepat waktu	3,25 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy High											
	Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB	83	KSU		Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB	83	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Safna		Indeks penyampaian Laporan Keuangan UAKPB KPPN secara tepat waktu	3,5 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy High	
	Persentase Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	KSU		Persentase Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Cascading Peta	Average	Proxy Law	Achy		Indeks penyusunan RKBMN secara benar dan tepat waktu	3,5 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate	



Ditandatangani secara elektronik
Hafnizar



MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE KPPN SIJUNJUNG TAHUN 2022

Unit : Kepala Subbagian Umum

Kemenkeu-Three			Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
1	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)	KSU	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65	Cascading Peta	Average	Exact Moderete	-	-	-	-	-	-	
2	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategi Focused Organization	84.5	KSU	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategi Focused Organization	84.5	Cascading Peta	Average	Proxy Moderete	Achy	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Indeks efektivitas pengelolaan dokumen kinerja Kemenkeu Three-Five KPPN	3,5	Non Cascading	-	Proxy High
						Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Raw Data	Proxy Moderete	Pelaksana Subbag Umum		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Average	Proxy High
3	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%	KSU	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderete	Safna	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Persentase penerbitan SPM secara akurat	100%	Cascading Non Peta	Average	Proxy High
						Indeks penyusunan LPJ Bendahara KPPN secara akurat dan tepat waktu	3,25 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate							
		Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB	83	KSU		Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB	83	Cascading Peta	Average	Proxy Moderete	Safna, Achy		Indeks penyampaian Laporan Keuangan UAKPA KPPN secara tepat waktu	3,5 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy High
		Persentase Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	KSU		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Cascading Peta	Average	Proxy Law	Achy		Indeks penyampaian Laporan Keuangan UAKPB KPPN secara tepat waktu	3,25 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy High
													Indeks penyusunan RKBMN secara benar dan tepat waktu	3,5 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate



Ditandatangani secara elektronik
Hafnizar



MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE KPPN SIJUNJUNG TAHUN 2022

Unit : Kepala Seksi PDMS

Kemenkeu-Three			Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	89	Kasi PDMS	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	89	Cascading Peta	Average	Proxy Law	-	-	-	-	-	-	-
2	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	99.40%	Kasi PDMS	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Nabila	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase data SPM yang divalidasi secara akurat	99%	Non Cascading	-	Proxy High
										Rozi		Persentase penyelesaian review SPM yang akurat dan tepat waktu	99%	Non Cascading	-	Proxy High
3	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implemen Aplikasi SAKTI	Kasi PDMS	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implemen Aplikasi SAKTI	100%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Vivit	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase penyiapan bahan dalam rangka implementasi SAKTI sesuai tahapan	100%	Non Cascading	-	Proxy High
		Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan			90%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	-	-			-	-		
4	Pengelolaan Kas yang Optimal	Persentase akurasi Perencanaan Kas	Kasi PDMS	Pengelolaan Kas yang Optimal	Persentase akurasi Perencanaan Kas KPPN	83%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Vivit	Pengelolaan Kas yang Optimal	Persentase satker yang menyampaikan rencana penarikan dana secara tepat waktu	90%	Non Cascading	-	Proxy Moderate
		Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas			3.15%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	-	-			-	-		
5	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	3 (skala 4)	Kasi PDMS	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Indeks Implementasi Digipay	3 (skala 4)	Cascading Peta	Average	Proxy Law	-	-	-	-	-	-	-
6	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	78	Kasi PDMS	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Pelaksana Seksi PDMS	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate



Ditandatangani secara elektronik
Hafnizar



MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE KPPN SIJUNJUNG TAHUN 2022

Unit : Kasi Bank

Kemenkeu-Three			Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	
1	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)	Kasi Bank	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.65	Cascading Peta	Average	Exact Moderate	-	-	-	-	-	-	
2	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	Kasi Bank	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.4%	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Adit	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase akurasi verifikasi Payment Process Request (PPR)	100%	Non Cascading	-	Proxy High
3	Pengelolaan Kas yang Optimal	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	Kasi Bank	Pengelolaan Kas yang optimal	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15%	Cascading Peta	Raw data	Proxy Moderate	Adit	Pengelolaan Kas yang optimal	Indeks ketepatan waktu penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D	Indeks 3	Non Cascading	-	Proxy High
				Adit							Indeks penyelesaian penerbitan SPP-Retur SP2D		3 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate	
6	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	Kasi Bank	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	Cascading Peta	Raw data	Proxy Moderate	Adit	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3 (skala 4)	Non Cascading	-	Proxy Moderate
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai rata-rata hard competency pegawai	84.5	Kasi Bank	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai rata-rata hard competency pegawai	84.5	Cascading Peta	Raw data	Proxy Moderate	Adit	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Average	Proxy High

Mengetahui,
Kepala KPPN Sijunjung

Ditandatangani secara
Hafnizar

MATRIKS CASCADING IKU KEMENKEU-THREE KPPN SIJUNJUNG TAHUN 2022

Unit : KASI VERA KI

Kemenkeu-Three			Kemenkeu-Four							Kemenkeu-Five						
Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	95	Kasi VeraKI	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	Nilai kualitas LK BUN KPPN	95	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Tari	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	Persentase penyusunan konsep LK Kuasa BUN KPPN secara tepat waktu	100%	Non Cascading	-	Proxy High
2	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	4,65 (Skala 5)	Kasi VeraKI	Birokrasi dan Layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.65	Cascading Peta	Average	Exact Moderate	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	90	Kasi VeraKI	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	Cascading Peta	Raw Data	Proxy Moderate	Tari	Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer ke Daerah dan Dana Desa	Indeks 3	Non Cascading	-	Proxy Moderate
					Indeks penyusunan LK Tingkat UAKPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara tepat waktu	Indeks 3,15	Non Cascading	-	Proxy Moderate							
4	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	3.25	Kasi VeraKI	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3.25	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Tari	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	Indeks satker yang melakukan upload data rekonsiliasi UAKPA secara tepat waktu	Indeks 3,5	Non Cascading	-	Proxy Moderate
		98.5%	Kasi VeraKI		Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.5%	Cascading Peta	Average				Proxy Moderate	Indeks satker yang menyampaikan data LPJ Bendahara secara tepat waktu	Indeks 3,25 (skala)	Non Cascading	-
5	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	.85	Kasi VeraKI	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal	.85	Cascading Peta	Average	Proxy Moderate	Endrawati	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Indeks penyusunan konsep rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Indeks 3	Non Cascading	-	Proxy High
		78	Kasi VeraKI		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Raw Data	Proxy Moderate			Pelaksana VeraKI	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Cascading Peta	Average



Ditandatangani secara elektronik
Hafnizar

